

ABSTRAK

Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir pantai, inilah alasan Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya hasil laut sangat melimpah khususnya perikanan. Maka tidak heran jika mayoritas masyarakat Sumenep berprofesi sebagai nelayan. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sudah diatur mengenai pengaturan khusus untuk keberlangsungan hidup nelayan namun disisi lain, nelayan di Kabupaten Sumenep mayoritas masih terbelang tradisional dan tidak terikat dalam kelembagaan yang resmi sehingga menyebabkan kesejahteraan nelayan terbelang rendah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris atau *Gabungan* dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang undangan (*statue approach*) dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum penegakan pengaturan nelayan.

Temuan dalam penelitian ini, menunjukan bahwa kelembagaan nelayan di Kabupaten Sumenep masih terbelang minim karena beberapa faktor, yang berakibat terhadap mininya perlindungan pemerintah terhadap nelayan, sementara disisi lain produksi perikanan di Kabupaten Sumenep semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya kekosongan hukum yang berakibat terhadap tidak adanya kepastian hukum terhadap nelayan di Sumenep khususnya terkait zona dan alat tangkap yang mengakomodir kepentingan nelayan dengan alat tradisional dan nelayan dengan alat tangkap modern, sehingga hal ini yang menyebabkan konflik antar nelayan.

Kata kunci : Kelembagaan Nelayan, Sumenep, Sumberdaya Perikanan, Kekosongan Hukum

ABSTRACT

Sumenep is an area where most of its territory is littoral, this is the reason Sumenep has abundant marine resources, especially fisheries. So do not be surprised if the majority of the people of Sumenep work as fishermen. According to Law No. 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fish Farmers and Fish Farmers Fisheries have been regulated regarding special arrangements for the survival of fishermen but on the other hand, the majority of fishermen in Sumenep are still relatively traditional and are not bound in official institutions so as to cause fisherman welfare is fairly low.

This research uses empirical or Combined normative research methods using two approaches, namely the case approach and the statue approach also regulations that relate to the legal issues of enforcing fisherman regulations.

From this study it was found that the institutional fishermen in Sumenep were still quite limited. This is caused by several factors, which results in the lack of government protection for fishermen. Meanwhile, on the other hand fisheries production in Sumenep is increasing from year to year. There is a legal vacuum that results in the absence of legal certainty for fishermen in Sumenep, especially related to zones and fishing gears that accommodate the interests of fishermen with traditional tools and fishermen with modern fishing gear, so this causes conflicts between fishermen.

Keywords: Fishermen's Institution, Sumenep, Fisheries Resources, Legal Vacancy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
KONSEP DAN TEORI KELEMBAGAAN NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI INDONESIA.....	13
2.1 Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13
2.2 Teori Kelembagaan Negara.....	23
2.3 Teori Pembentukan Perundang-Undangan.....	25
2.4 Kepastian Hukum.....	28
2.5 Teori Kewenangan	30
2.6 Teori Perlindungan hukum.....	32
2.7 Penegakan Hukum.....	34
BAB III.....	36
PERAN KELEMBAGAAN NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN SUMENEP	36

3.1 Penegakan Kelembagaan Nelayan dalam Melindungi Hak Nelayan di Indonesia.	36
3.2 Pelaksanaan dan Kendala dalam Perlindungan Hak Nelayan di Kabupaten Sumenep.	37
BAB IV	50
PENUTUP.....	50
3.1 Kesimpulan.....	50
3.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
BIODATA PENULIS.....	56